

## Evaluasi dan Analisis Kebijakan Pendidikan Islam

(Implementasi, Tantangan, dan Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan)

Yuni Hasnidar<sup>1</sup>, Samsu<sup>2</sup>

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [yuni.hasnidar1973@gmail.com](mailto:yuni.hasnidar1973@gmail.com), [samsu@uinjambi.ac.id](mailto:samsu@uinjambi.ac.id)

Article received: 01 Mei 2026, Review process: 11 Mei 2026

Article Accepted: 27 Mei 2026, Article published: 03 Juni 2026

### ABSTRACT

The evaluation and analysis of Islamic education policy are essential to ensuring the effectiveness, relevance, and sustainability of policies aimed at improving the quality of Islamic education. This study aims to analyze the concepts of evaluation and policy analysis in Islamic education, identify factors influencing policy implementation, and formulate adaptive and sustainable policy improvement strategies. The study employed a library research method with a descriptive qualitative approach through the analysis of relevant books, scientific journals, regulations, and scholarly documents. The findings reveal that policy evaluation plays a significant role in assessing the effectiveness, efficiency, relevance, and impact of policies on educational quality improvement, while policy analysis functions to identify problems, evaluate implementation processes, and generate appropriate policy recommendations. The success of policy implementation is influenced by communication, resources, implementers' disposition, and bureaucratic structure. Policy improvement strategies include enhancing educator quality, strengthening educational funding, reforming curricula, improving the public image of Islamic education, and utilizing technology in educational management. The implication of this study highlights the importance of continuous policy evaluation and analysis in realizing Islamic education that is excellent, adaptive to change, and oriented toward public benefit.

**Keywords:** Policy Evaluation, Policy Analysis, Islamic Education, Educational Quality, Policy Implementation

### ABSTRAK

Evaluasi dan analisis kebijakan pendidikan Islam menjadi aspek penting dalam memastikan efektivitas, relevansi, dan keberlanjutan kebijakan dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep evaluasi dan analisis kebijakan pendidikan Islam, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya, serta merumuskan strategi perbaikan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis berbagai sumber ilmiah berupa buku, jurnal, regulasi, dan dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan pendidikan Islam berperan dalam menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak kebijakan terhadap peningkatan mutu pendidikan, sedangkan analisis kebijakan berfungsi mengidentifikasi permasalahan, mengevaluasi implementasi, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Strategi perbaikan kebijakan meliputi

---

*peningkatan kualitas pendidik, penguatan dukungan anggaran, reformasi kurikulum, penguatan citra pendidikan Islam, dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pendidikan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya evaluasi dan analisis kebijakan yang berkelanjutan untuk mewujudkan pendidikan Islam yang unggul, responsif terhadap perubahan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.*

**Kata Kunci:** *Evaluasi Kebijakan, Analisis Kebijakan, Pendidikan Islam, Mutu Pendidikan, Implementasi Kebijakan*

## PENDAHULUAN

Pendidikan Islam merupakan bagian integral dari sistem pendidikan yang memiliki peran strategis dalam membentuk manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Keberadaan pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transmisi ilmu pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan Islam berkontribusi dalam mencetak sumber daya manusia yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan oleh berbagai pemangku kepentingan, baik pada tingkat nasional maupun kelembagaan (Azra, 2019; Muhaimin, 2017).

Perkembangan globalisasi, transformasi digital, serta perubahan sosial yang berlangsung secara cepat menuntut pendidikan Islam untuk terus melakukan penyesuaian dan inovasi. Lembaga pendidikan Islam saat ini dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, mulai dari peningkatan mutu pembelajaran, penguatan kompetensi pendidik, integrasi ilmu agama dan ilmu umum, hingga pemanfaatan teknologi dalam proses pendidikan. Kondisi tersebut mengharuskan adanya kebijakan pendidikan Islam yang tidak hanya responsif terhadap perubahan, tetapi juga mampu menjaga identitas dan nilai-nilai dasar pendidikan Islam. Kebijakan yang dirumuskan secara tepat diyakini dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing lembaga pendidikan Islam di tingkat nasional maupun global (Auda, 2021; Nata, 2020).

Meskipun berbagai kebijakan pendidikan Islam telah diterapkan, realitas di lapangan menunjukkan masih terdapat sejumlah persoalan yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Kesenjangan mutu antar lembaga pendidikan Islam, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kualitas sebagian tenaga pendidik, serta ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan menjadi tantangan yang masih sering ditemukan. Selain itu, kebijakan pendidikan Islam juga dihadapkan pada persoalan integrasi nilai-nilai keislaman dengan tuntutan kompetensi abad ke-21 yang semakin kompleks. Situasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh efektivitas implementasi dan pengawasannya di lapangan (Tilaar & Nugroho, 2016; Edward III, 1980).

Dalam konteks tersebut, evaluasi kebijakan pendidikan Islam menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan

---

mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi berfungsi sebagai proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak suatu kebijakan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Melalui evaluasi, berbagai kelemahan dan hambatan implementasi dapat diidentifikasi sehingga menjadi dasar dalam melakukan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan. Evaluasi juga berperan dalam mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan serta memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan Islam (Dunn, 2018; Stufflebeam & Shinkfield, 2017).

Selain evaluasi, analisis kebijakan memiliki peran yang tidak kalah penting dalam mengkaji substansi kebijakan, memahami faktor-faktor yang memengaruhi implementasi, serta menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Analisis kebijakan pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada aspek administratif dan teknis, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi normatif yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Pendekatan ini diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif dalam pelaksanaannya, tetapi juga mampu mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan penguatan karakter peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Dengan demikian, evaluasi dan analisis kebijakan menjadi dua instrumen yang saling melengkapi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Islam secara berkelanjutan (Anderson, 2011; Auda, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep evaluasi dan analisis kebijakan pendidikan Islam, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya, serta merumuskan strategi perbaikan kebijakan yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan Islam secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian Manajemen Pendidikan Islam serta menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan Islam yang lebih berkualitas dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Azra, 2019; Nata, 2020).

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan evaluasi dan analisis kebijakan pendidikan Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, penelaahan, dan pengkajian secara sistematis terhadap sumber-sumber yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep evaluasi dan analisis kebijakan pendidikan Islam, faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya, serta strategi perbaikan kebijakan yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan Islam secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Evaluasi Kebijakan Pendidikan Islam dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Evaluasi kebijakan pendidikan Islam merupakan salah satu instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan mampu mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks pendidikan Islam, evaluasi tidak hanya berfungsi untuk mengukur ketercapaian program, tetapi juga untuk menilai kesesuaian kebijakan dengan nilai-nilai keislaman dan kebutuhan masyarakat. Melalui evaluasi yang sistematis, berbagai kelemahan dalam proses implementasi dapat diidentifikasi sehingga menjadi dasar bagi penyempurnaan kebijakan di masa mendatang. Keberadaan evaluasi menjadi semakin penting mengingat dinamika pendidikan yang terus mengalami perubahan akibat perkembangan teknologi, sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan harus dipandang sebagai bagian integral dari siklus kebijakan pendidikan Islam yang berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan (Dunn, 2018).

Keberhasilan evaluasi kebijakan pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh kejelasan tujuan yang ingin dicapai. Setiap kebijakan pendidikan dirancang untuk menjawab kebutuhan tertentu, baik yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan karakter peserta didik, maupun pengembangan kelembagaan pendidikan Islam. Evaluasi berfungsi untuk mengukur sejauh mana tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai program yang telah dijalankan. Apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan dan capaian, maka diperlukan langkah korektif yang tepat agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, evaluasi bukan hanya aktivitas administratif, tetapi juga menjadi sarana refleksi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Islam.

Perspektif pendidikan Islam memandang evaluasi sebagai bagian dari konsep *muhasabah* atau introspeksi yang bertujuan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Konsep ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas pendidikan perlu ditinjau kembali untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangannya. Evaluasi yang dilandasi semangat *muhasabah* tidak sekadar mencari kesalahan, melainkan berupaya menemukan solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Al-Attas (1980) yang menegaskan bahwa pendidikan Islam harus berorientasi pada pembentukan manusia beradab yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan moral. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan pendidikan Islam harus mampu mengukur keberhasilan pencapaian aspek akademik sekaligus aspek karakter dan spiritual peserta didik.

Dalam praktiknya, evaluasi kebijakan pendidikan Islam sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah dominasi evaluasi yang lebih berorientasi pada aspek administratif dibandingkan aspek substantif. Banyak lembaga pendidikan lebih menitikberatkan pada pemenuhan dokumen dan laporan formal daripada mengukur dampak nyata kebijakan terhadap kualitas pendidikan. Kondisi ini menyebabkan evaluasi kurang mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas kebijakan yang diterapkan. Penelitian yang dilakukan oleh Widoyoko (2020) menunjukkan bahwa evaluasi yang hanya

berfokus pada aspek administratif cenderung menghasilkan rekomendasi yang kurang menyentuh akar permasalahan pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan evaluasi yang lebih komprehensif dan berorientasi pada hasil.

Selain itu, keterbatasan indikator evaluasi juga menjadi persoalan yang sering ditemukan dalam pendidikan Islam. Banyak aspek penting seperti pembentukan akhlak, internalisasi nilai keagamaan, dan penguatan spiritualitas peserta didik sulit diukur menggunakan indikator kuantitatif. Akibatnya, keberhasilan pendidikan Islam sering kali hanya dinilai berdasarkan capaian akademik semata. Padahal tujuan utama pendidikan Islam mencakup pembentukan kepribadian yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Muhaimin (2017) menjelaskan bahwa evaluasi pendidikan Islam perlu mengintegrasikan indikator kognitif, afektif, dan psikomotorik agar mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai keberhasilan proses pendidikan.

Evaluasi kebijakan juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan akuntabilitas lembaga pendidikan Islam. Melalui evaluasi, setiap program yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, pemerintah, maupun pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas menjadi indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang transparan dan profesional. Semakin baik sistem evaluasi yang diterapkan, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian Nata (2020) yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan yang memiliki budaya evaluasi yang kuat cenderung lebih adaptif terhadap perubahan dan mampu mempertahankan kualitasnya dalam jangka panjang.

Hasil evaluasi kebijakan pendidikan Islam juga berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Informasi yang diperoleh melalui evaluasi dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu program perlu dilanjutkan, diperbaiki, diperluas, atau bahkan dihentikan. Dengan kata lain, evaluasi menyediakan bukti empiris yang dapat membantu pengambil kebijakan dalam merumuskan keputusan yang lebih rasional dan objektif. Stufflebeam dan Shinkfield (2017) menegaskan bahwa evaluasi yang baik harus menghasilkan informasi yang relevan, akurat, dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan program selanjutnya. Dalam konteks pendidikan Islam, penggunaan hasil evaluasi secara optimal dapat memperkuat efektivitas kebijakan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa evaluasi kebijakan pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran keberhasilan kebijakan, tetapi juga sebagai instrumen perbaikan, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang berkelanjutan. Melalui evaluasi yang komprehensif dan berbasis pada nilai-nilai Islam, lembaga pendidikan dapat mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan demikian, evaluasi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pendidikan Islam yang unggul, adaptif, dan mampu menjawab tuntutan perkembangan zaman.

### *Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam: Faktor Pendukung dan Penghambat*

Analisis implementasi kebijakan pendidikan Islam merupakan proses penting untuk memahami bagaimana suatu kebijakan diterapkan dalam praktik serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Kebijakan yang dirumuskan dengan baik tidak akan menghasilkan dampak yang optimal apabila implementasinya tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, analisis implementasi diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kondisi yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam. Melalui analisis tersebut, para pengambil kebijakan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas kebijakan serta berbagai permasalahan yang muncul di lapangan.

Salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan Islam adalah komunikasi. Komunikasi yang efektif memungkinkan seluruh pihak yang terlibat memahami tujuan, prosedur, dan target kebijakan secara jelas. Sebaliknya, komunikasi yang kurang efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman sehingga implementasi kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Edward III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kejelasan informasi yang diterima oleh para pelaksana. Dalam konteks pendidikan Islam, komunikasi yang baik antara pemerintah, pengelola lembaga pendidikan, guru, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan dapat diterapkan secara optimal.

Selain komunikasi, sumber daya juga menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan Islam. Sumber daya tersebut meliputi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta dukungan finansial yang memadai. Banyak lembaga pendidikan Islam, khususnya yang berada di daerah terpencil, masih menghadapi keterbatasan sumber daya sehingga kesulitan melaksanakan berbagai program yang telah direncanakan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan kualitas antar lembaga pendidikan Islam. Penelitian Tilaar dan Nugroho (2016) menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya sering menjadi penyebab utama rendahnya efektivitas implementasi kebijakan pendidikan di berbagai daerah.

Faktor berikutnya adalah disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan. Implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik apabila para pelaksana memiliki komitmen, integritas, dan kesediaan untuk mendukung tujuan kebijakan. Sebaliknya, apabila terdapat resistensi atau kurangnya dukungan dari pelaksana, maka kebijakan akan sulit mencapai hasil yang diharapkan. Dalam pendidikan Islam, peran kepala madrasah, guru, dan tenaga kependidikan sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai agen perubahan yang bertugas menginternalisasikan nilai-nilai kebijakan ke dalam praktik pendidikan sehari-hari.

Struktur birokrasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam. Struktur birokrasi yang jelas akan memudahkan koordinasi, pembagian tugas, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, birokrasi yang terlalu kompleks dapat memperlambat proses

implementasi dan menimbulkan berbagai hambatan administratif. Dalam beberapa kasus, tumpang tindih kewenangan antar lembaga menyebabkan kebijakan pendidikan Islam tidak berjalan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan sistem birokrasi yang sederhana, responsif, dan berorientasi pada pelayanan agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lebih optimal.

Di samping faktor internal, implementasi kebijakan pendidikan Islam juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perkembangan teknologi, kondisi sosial masyarakat, serta kebijakan pemerintah yang lebih luas. Transformasi digital, misalnya, telah mendorong lembaga pendidikan Islam untuk beradaptasi dengan berbagai inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Namun, tidak semua lembaga memiliki kesiapan yang sama dalam menghadapi perubahan tersebut. Akibatnya, muncul kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi yang berdampak pada kualitas layanan pendidikan. Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat juga memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan Islam. Dukungan masyarakat dalam bentuk keterlibatan orang tua, organisasi keagamaan, dan tokoh masyarakat dapat memperkuat pelaksanaan berbagai program pendidikan. Sebaliknya, rendahnya partisipasi masyarakat sering menjadi hambatan dalam mewujudkan tujuan kebijakan. Azra (2019) menegaskan bahwa pendidikan Islam pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, perkembangan lingkungan, dan partisipasi masyarakat merupakan elemen penting yang menentukan keberhasilan kebijakan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas implementasi kebijakan harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan seluruh faktor tersebut agar tujuan pendidikan Islam dapat tercapai secara optimal.

### **Strategi Penguatan dan Perbaikan Kebijakan Pendidikan Islam Berkelanjutan**

Perbaikan kebijakan pendidikan Islam merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam menghadapi berbagai perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi yang berlangsung secara cepat. Kebijakan pendidikan yang efektif harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempertahankan nilai-nilai dasar pendidikan Islam sebagai fondasi pembentukan karakter peserta didik. Oleh karena itu, strategi penguatan kebijakan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mencakup penguatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, dan relevansi program pendidikan dengan tuntutan zaman. Kebijakan yang adaptif akan memungkinkan lembaga pendidikan Islam berkembang secara berkelanjutan tanpa kehilangan identitas keislamannya. Dalam perspektif manajemen pendidikan, perbaikan kebijakan merupakan bagian dari

---

proses peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*) yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana (Mulyasa, 2019).

Salah satu strategi utama yang perlu dilakukan adalah peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Guru merupakan aktor utama dalam implementasi kebijakan pendidikan karena berhadapan langsung dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Keberhasilan berbagai program pendidikan sangat dipengaruhi oleh kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang dimiliki oleh guru. Oleh sebab itu, program pelatihan, pengembangan kompetensi, sertifikasi, serta pendampingan profesional perlu dilakukan secara berkelanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh Hattie (2018) menunjukkan bahwa kualitas guru merupakan faktor paling berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran dibandingkan faktor-faktor lainnya. Dalam pendidikan Islam, peningkatan kompetensi guru juga harus mencakup penguatan pemahaman keislaman dan kemampuan mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam proses pembelajaran.

Strategi berikutnya adalah penguatan dukungan anggaran pendidikan Islam. Keterbatasan dana sering menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan berbagai program pendidikan, terutama di madrasah dan lembaga pendidikan Islam yang berada di wilayah terpencil. Dukungan anggaran yang memadai diperlukan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, serta penyelenggaraan program-program inovatif. Kebijakan pembiayaan pendidikan yang berkeadilan akan membantu mengurangi kesenjangan mutu antar lembaga pendidikan Islam. Temuan Kementerian Agama Republik Indonesia (2024) menunjukkan bahwa peningkatan investasi pendidikan memiliki korelasi positif terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan dan prestasi peserta didik.

Reformasi kurikulum juga menjadi strategi penting dalam memperkuat kebijakan pendidikan Islam. Kurikulum harus dirancang secara fleksibel dan responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum perlu terus diperkuat agar peserta didik memiliki kompetensi akademik yang tinggi tanpa kehilangan identitas spiritualnya. Pendidikan Islam tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu agama, tetapi juga harus mampu membekali peserta didik dengan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Muhaimin (2017) menegaskan bahwa integrasi keilmuan merupakan salah satu kunci utama dalam membangun sistem pendidikan Islam yang relevan dengan perkembangan zaman.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi strategi lain yang sangat penting dalam penguatan kebijakan pendidikan Islam. Transformasi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam perlu mengembangkan sistem pembelajaran berbasis teknologi yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pendidikan. Penggunaan platform digital, media pembelajaran interaktif, serta sistem administrasi berbasis teknologi dapat membantu meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Penelitian UNESCO (2023) menunjukkan bahwa pemanfaatan

teknologi secara tepat mampu memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun demikian, penggunaan teknologi tetap harus diarahkan pada penguatan nilai-nilai moral dan etika agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi peserta didik.

Selain aspek teknis, penguatan tata kelola kelembagaan juga menjadi bagian penting dari strategi perbaikan kebijakan pendidikan Islam. Tata kelola yang baik ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Kepala madrasah dan pimpinan lembaga pendidikan Islam perlu mengembangkan budaya organisasi yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Sistem pengawasan dan evaluasi internal juga perlu diperkuat agar berbagai program yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nata (2020) menjelaskan bahwa tata kelola yang profesional merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan lembaga pendidikan Islam yang unggul dan berdaya saing.

Partisipasi masyarakat juga harus menjadi perhatian dalam strategi penguatan kebijakan pendidikan Islam. Keterlibatan orang tua, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan dunia usaha dapat memberikan dukungan yang signifikan terhadap pengembangan lembaga pendidikan. Pendidikan Islam pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi antara berbagai pihak. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin besar peluang keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan. Penelitian Epstein (2019) menunjukkan bahwa kolaborasi antara sekolah dan masyarakat berkontribusi positif terhadap peningkatan prestasi belajar, pembentukan karakter, dan keberhasilan program pendidikan secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian tersebut, strategi penguatan dan perbaikan kebijakan pendidikan Islam harus dilakukan secara komprehensif melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan dukungan anggaran, reformasi kurikulum, pemanfaatan teknologi, penguatan tata kelola kelembagaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Strategi tersebut perlu dilaksanakan secara terpadu agar mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi pendidikan Islam pada era modern. Dengan kebijakan yang adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan, pendidikan Islam diharapkan mampu menghasilkan generasi yang unggul secara akademik, kuat secara spiritual, dan siap berkontribusi dalam pembangunan masyarakat serta peradaban bangsa

## SIMPULAN

Evaluasi dan analisis kebijakan pendidikan Islam merupakan instrumen strategis dalam memastikan efektivitas, relevansi, dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan Islam. Evaluasi berfungsi untuk menilai ketercapaian tujuan kebijakan, mengidentifikasi berbagai kendala implementasi, serta menjadi dasar perbaikan kebijakan secara berkelanjutan, sedangkan analisis kebijakan berperan dalam memahami substansi, proses implementasi, faktor pendukung dan penghambat, serta dampak kebijakan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan Islam dipengaruhi oleh kualitas

komunikasi, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, dan efektivitas struktur birokrasi. Oleh karena itu, penguatan kualitas pendidik, reformasi kurikulum, optimalisasi pemanfaatan teknologi, peningkatan dukungan anggaran, penguatan tata kelola kelembagaan, serta partisipasi masyarakat menjadi strategi penting dalam mewujudkan kebijakan pendidikan Islam yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, evaluasi dan analisis kebijakan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dapat menjadi landasan bagi pengembangan pendidikan Islam yang unggul, berdaya saing, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2011). *Public policymaking* (7th ed.). Wadsworth Cengage Learning.
- Al-Attas, S. M. N. (1980). *The concept of education in Islam*. International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Auda, J. (2021). *Maqashid syariah sebagai pendekatan sistem dalam hukum Islam*. Mizan.
- Azra, A. (2019). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Kencana.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Epstein, J. L. (2019). *School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools* (3rd ed.). Routledge.
- Hattie, J. (2018). *Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*. Routledge.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Statistik pendidikan Islam Indonesia 2024*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Mulyasa, E. (2019). *Manajemen berbasis sekolah: Konsep, strategi, dan implementasi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2017). *Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Nata, A. (2020). *Filsafat pendidikan Islam*. Kencana.
- Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2017). *Evaluation theory, models, and applications*. Jossey-Bass.
- Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2016). *Kebijakan pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik*. Pustaka Pelajar.
- UNESCO. (2023). *Global education monitoring report 2023: Technology in education*. UNESCO Publishing.
- Widoyoko, E. P. (2020). *Evaluasi program pembelajaran: Panduan praktis bagi pendidik dan calon pendidik*. Pustaka Pelajar